BAB IV

ANALISIS

A. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan pada Program Bhakti Sosial Terpadu

Partisipasi masyarakat merupakan kebutuhan dalam mewujudkan pembangunan. Pembangunan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berawal dari suara masyarakat. Masyarakat berhak menyuarakan yang dibutuhkan untuk memenuhi kesejahteraannya. Dalam melaksanakan pembangunan, masyarakat memiliki peran *desisif* yaitu berhak memberi atau menentukan keputusan yang sekiranya dapat meningkatkan kesejahteraan. Seperti halnya pada pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun melalui program Bhakti Sosial Terpadu (BST). Berdasar wawancara dengan Kepala Desa Gandul, Bapak Sunarto:[1]

> Jadi sebelum ada kegiatan BST dilakukan di desa, kami pemerintah desa terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan masyarakat. Musyawarah tersebut membahas tentang kebutuhan masyarakat di berbagai bidang yang nantinya dapat diajukan ke pemkab dan diwujudkan saat kegiatan BST.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Edi[2]. Beliau menyatakan bahwa dalam BST, setiap suara masyarakat akan ditampung oleh pemkab, kemudian diserahkan kepada dinas terkait sehingga dapat sesuai dengan rencana pembangunan yang sudah ada.

> Program BST berawal dari suara masyarakat. Masyarakat menyuarakan kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraannya. Masyarakat yang mengetahui dan merasakan apa saja yang dibutuhkan agar sejahtera. Jadi pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Pemkab Madiun dapat sesuai dengan porsinya dan tepat sasaran.

[1]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.
[2]Ibnu Su'ud Edi, *Wawancara*, Madiun, November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun pada pembangunan, utamanya pembangunan berkelanjutan, suara masyarakat yang diaspirasikan tidak langsung diwujudkan. Dalam hal ini pemerintah memiliki wewenang untuk menyaring aspirasi. Seperti Pemkab Madiun dalam melakukan pembangunan melalui BST, terlebih dulu melihat potensi alam yang dimiliki desa ditambah dengan potensi masyarakatnya. Seperti yang diungkapkan Bapak Edi:[3]

> Jadi Pemkab bersama dinas menyaring permintaan masyarakat. Disesuaikan dengan potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Jadi bisa sesuai dengan rencana pembangunan daerah dan APBD. Meskipun aspirasi banyak disaring bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa, justru partisipasi masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dalam pembangunan sangat diperlukan. Apabila masyarakat tidak bersuara maka pemerintah tidak akan tahu secara mendalam apa yang dibutuhkan masyarakat.

Sumber daya yang dimiliki Desa Gandul sangat banyak dan membutuhkan pengembangan untuk potensi-potensinya, terutama potensi masyarakat agar lebih mandiri sesuai dengan tujuan BST tersebut. Adanya program BST, membantu masyarakat untuk menyalurkan keterampilannya. Seperti yang dilakukan Pemerintah Desa Gandul beserta kelompok PKK yang mengajukan permintaan untuk mengembangkan potensi yang sudah ada. Sesuai pernyataan Ibu Munir:[4]

> Ibu-ibu PKK sudah memiliki keterampilan membuat *tahu pong*. Bahan bakunya sendiri didapat dari pabrik tahu yang ada di desa. Bahan-bahan lainnya juga mudah didapatkan, namun dalam pembuatannya diperlukan alat. Alat yang digunakan untuk membuat bola-bola *tahu pong*. Karena pembuatan manual memakan tenaga dan waktu yang banyak.

Berdasar pernyataan tersebut, PKK desa Gandul menyadari adanya potensi untuk ibu-ibu yang dapat dilakukan selain menjadi ibu rumah tangga. Namun PKK

[3]Ibnu Su'ud Edi, *Wawancara*, Madiun, November 2016.
[4]Munir, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membutuhkan alat pembuat *tahu pong*. Dalam hal ini PKK berharap pemkab membantu dengan disediakan alat agar mempermudah proses produksi.

Dalam pembangunan berkelanjutan, selain memiliki peran *desisif* masyarakat juga dituntut memiliki peran *responsibel*. Peran *responsibel* yaitu bentuk tanggungjawab masyarakat terhadap pembangunan yang akan dan sudah dilakukan. Dengan adanya peran *responsibel* maka masyarakat tidak boleh lepas tangan terhadap aspirasi yang sudah dituangkan saat rencana awal pembangunan. Masyarakat harus turut serta dalam menjalankan pembangunan. Sehingga kesejahteraan yang diinginkan masyarakat dapat terwujud, karena tujuan dari pembangunan sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti pernyataan Ibu Munir:[5]

> Sejauh ini masyarakat Desa Gandul menjadi perhatian desa-desa lain karena antusiasme-nya saat kegiatan BST yang luar biasa tidak seperti desa-desa lainnya. Banyak sekali masyarakat ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan pada saat BST.

Hal senada tentang peran responsibel masyarakat juga diungkapkan oleh Ibu Sutarmi:[6]

> Masyarakat Gandul memiliki respon yang luar biasa terhadap kegiatan BST. Meskipun kegiatan rutinan tetapi tidak membuat masyarakat bosan. Selain dapat bertemu dengan Bupati, masyarakat juga dapat menikmati berbagai pelayanan. Seperti mengurus perpanjangan KTP tidak perlu rumit. Ditambah ketika malam sarasehan masyarakat memiliki waktu untuk mengeluarkan aspirasinya.

Berbicara tentang pembangunan berkelanjutan maka membahas juga tentang *Sustainable Development Goals* (SDGs). Gugus tugas pemerintah daerah (GTF) dalam proses SDGs telah mengajukan berbagai usulan substansial yang penting, yang akhirnya masuk menjadi tujuan dan sasaran dalam SDGs. Tujuan tersebut terdapat dibidang kesehatan, kesetaraan gender, ketersediaan air, pembangunan infrastruktur, serta keterbukaan pemerintah terhadap penganggaran.

[5]Munir, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.
[6]Sutarmi, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa tujuan tersebut terdapat pada kegiatan yang dilakukan pada program BST. Salah seorang warga, Bapak Sunarto menyatakan bahwa:[7]

> Pada program BST banyak bantuan yang diterima masyarakat Gandul. Ada bantuan langsung seperti uang tunai, ada juga dibidang pendidikan yaitu buku-buku, bidang kesehatan ada posyandu, KB gratis. Dibidang pertanian dan peternakan ada traktor dan kambing. Untuk pembangunan infrastrukturnya ada pengaspalan jalan kemudian ada juga drainase.

Pernyataan tersebut memperkuat bahwa Pemkab Madiun telah menjalankan tugasnya dalam pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan SDGs. Dilihat dari bidang kesehatan yaitu adanya pelayanan posyandu, KB gratis dan penyuluhan tentang pentingnya kesehatan. Adapula dibidang pembangunan infrastruktur ada pengaspalan jalan.

Berdasar beberapa pernyataan diatas, partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan pada program BST di Desa Gandul dapat digolongkan pada masyarakat yang aktif. Terlihat pada awal proses ketika akan diselenggarakan program BST, masyarakat sudah ikut serta dalam menyuarakan pendapatnya melalui musyawarah bersama pemerintah desa. Masyarakat membantu proses pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemkab. Melalui musyawarah tersebut maka terbentuk sebuah perencanaan yang nantinya menjadi penopang pembangunan.

Selain itu ditengah pelaksanaan kegiatan BST masyarakat juga sangat partisipatif. Seperti ikut serta dalam berbagai kegiatan pelayanan dan gotong royong dalam pembangunan infrastruktur. Dengan demikian maka masyarakat tidak hanya mengeluarkan permintaan atau tuntutan pembangunan tetapi juga konsisten dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan tersebut. Sebagai penikmat pembangunan, masyarakat Gandul bertanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan.

[7]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun masyarakat Gandul tergolong sangat partisipatif, namun pemerintah juga perlu meningkatkan partisipasi masyarakat. Sehingga masyarakat yang masih memilih ke sawah dapat meninggalkan kegiatan sawahnya untuk sementara dan beralih untuk berpartisipasi dalam kegiatan BST. Dalam hal ini pemerintah desa memiliki cara untuk mensosialisasikan tentang BST melalui pengumuman dengan pengeras suara menggunakan mobil dan berkeliling desa. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Gandul Bapak Sunarto:[8]

> Untuk menarik perhatian masyarakat tentang perlunya mengikuti kegiatan BST, sehari sebelum kegiatan BST dilaksanakan, terlebih dulu pemerintah desa berkeliling desa dengan menggunakan mobil. Mengumumkan bahwa banyak kegiatan yang diselenggarakan utamanya pengobatan gratis, sembako murah dan kegiatan gotong royong.

Selain pemerintah desa, pemerintah kabupaten juga tidak ingin kalah dalam mensosialisasikan kegiatan BST. Pemkab juga melakukan hal yang sama tetapi diwaktu yang berbeda. Selain itu pemkab memberikan *reward* kepada desa yang memiliki kemandirian yang sangat tinggi. Sehingga BST bukan hanya wadah untuk mendekatkan jarak antara bupati dan masyarakat tetapi juga sebagai ajang perlombaan untuk masyarakat di suatu desa berlomba dengan masyarakat desa lainnya dalam meningkatkan kemandirian, kreatif dan inovatif. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Edi:[9]

> Untuk menarik minat masyarakat dalam kegiatan BST dan untuk mewujudkan tujuan BST, pemkab menjadikan BST sebagai ajang perlombaan. Dengan reward berupa seperangkat komputer dengan harapan masyarakat semakin mandiri, kreatif dan inovatif dalam pembangunan berkelanjutan. Dari 15 desa dalam 1 tahun akan diambil 3 pemenang dengan kategori desa kecil, desa sedang dan desa besar. Perlombaan ini sudah berjalan selama 3 tahun.

[8]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.
[9]Ibnu Su'ud Edi, *Wawancara*, Madiun, November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasar beberapa pernyataan diatas, maka pemerintah memiliki trik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk lebih partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan. Baik pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten sangat membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan melalui program Bhakti Sosial Terpadu.

B. Implementasi dan Hambatan Program Bhakti Sosial Terpadu

1. Implementasi Program Bhakti Sosial Terpadu

Kegiatan BST di desa Gandul dilaksanakan pada tanggal 23-24 agustus 2016 dengan agenda sebagai berikut:[10]

a. Kegiatan olahraga

Kegiatan olahraga yang dilakukan pada pembukaan kegiatan BST yaitu volly. Olahraga volly dilakukan saat pertama kali Bupati datang yaitu tanggal 23 agustus 2016 pukul 16.00 yang diikuti karang taruna, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Volly yang dilaksanakan yaitu volly putra dan putri. Lokasi kegiatan olahraga yaitu di lapangan volly RT03/RW01 desa Gandul. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan adalah Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Pada saat sebelum kegiatan olahraga dimulai sekitar pukul 15.00 WIB, Pemerintah Desa Gandul memberikan sedikit hiburan untuk masyarakat sekaligus sambil menunggu kedatangan Bupati dan untuk penyambutan. Hiburan tersebut adalah *jaranan* dan *reog* milik warga desa setempat. Kegiatan olahraga dilakukan dengan tujuan supaya masyarakat merasa dekat dengan pemerintah, sehingga dapat menciptakan suasana

[10]Bhakti Sosial Terpadu "Guyub Rukun" Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun. 2016. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerukunan dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan kedekatan jarak tersebut diharapkan mempermudah proses pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan. Berikut pernyataan Kepala Desa Gandul, Bapak Sunarto:[11]

> Pembukaan awal kegiatan BST ada *jaranan* untuk penyambutan bupati. Setelah itu beberapa sambutan kemudian kegiatan olahraga. Kegiatan olahraganya yaitu volly putra yang diikuti karang taruna, pemkab, pemerintah desa dan juga oleh bupati, serta volly putri yang diikuti karang taruna, pemkab dan ibu bupati. Kegiatan olahraga ini disaksikan oleh seluruh warga Gandul. Tujuannya adalah agar pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten dapat berbaur dengan masyarakat, begitupula masyarakat merasa dekat dengan pemerintah.

b. Kegiatan sarasehan

Kegiatan sarasehan diadakan sekitar pukul 18.00 bertempat di lapangan perhutani RT09/RW02 Desa Gandul. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari perangkat desa, lembaga desa, ulama, pemuda, tokoh masyarakat dan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, pemkab menyuguhkan hiburan yaitu "Kirun" campursari. Penanggung jawab pelaksanaan yaitu Kepala Bagian Umum.

Kegiatan sarasehan merupakan wadah komunikasi antara masyarakat dan pemkab. Selain permintaan masyarakat tentang perbaikan sarana prasarana, juga terdapat himbauan pemkab kepada masyarakat untuk mewujudkan visi misi Bupati Madiun yaitu menciptakan masyarakat yang mandiri. Sehingga masyarakat tidak terus menerus bergantung pada pemerintah. Seperti pernyataan Bapak Saji:[12]

> Sarasehan itu bisa dikatakan sebagai wadah komunikasi langsung antara masyarakat dengan bupati. Di sarasehan masyarakat berhak

[11]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, Oktober 2016.
[12]Saji, *Wawancara*, Madiun, Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyampaikan keluhan tentang permintaan terhadap pembangunan seperti perbaikan infrastruktur dan sebagainya.

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Bapak Edi. Beliau menyatakan bahwa:[13]

> Kegiatan sarasehan tempat masyarakat menyampaikan keluhannya. Tetapi tidak hanya itu, dalam sarsehan bupati juga menyampaikan visi misinya untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri. Sehingga diharapkan kerjasamanya agar cepat melaksanakan proses pembangunan masyarakat mandiri.

c. Kegiatan kerja bhakti

Bentuk kerja bhakti yang dilakukan saat program BST yaitu pengaspalan jalan sepanjang volume 529 m x 2,5 m. Kegiatan pengaspalan jalan dilakukan di RT06 Desa Gandul. Dalam kerja bhakti tersebut diikuti oleh sekitar 600 orang. Penanggung jawab pelaksana yaitu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan CK. Program BST menerapkan sistem gotong royong sebagai cara untuk mempercepat pembangunan. Seperti yang diugkapkan oleh Bapak Edi:[14]

> BST itu menerapkan "Guyub Rukun". Dalam hal ini pemerintah utamanya Bupati menginginkan agar masyarakat hidup rukun, saling bekerja sama, dan mandiri agar pembangunan berkelanjutan yang diharapakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai keinginan masyarakat dan visi misi Bupati.

d. Kegiatan pelayanan kesehatan

1) Posyandu

Pelayanan posyandu dilakukan kepada sekitar 100 balita. Lokasi posyandu dilakukan di rumah Bapak Karman RT06/RW01 Desa Gandul. Penanggung jawab pelaksana yaitu Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan.

[13]Ibnu Su'ud Edi, *Wawancara*, Madiun, November 2016.
[14]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Pengobatan gratis

Pengobatan gratis dilakukan kepada sekitar 300 orang. Pemkab menyediakan petugas pelayanan yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis mata, spesialis bedah, spesialis kulit, spesialis anak dan kandungan). Lokasi pengobatan gratis di rumah Bapak Sutikno RT01/RW01 desa Gandul. Penanggung jawab pelaksana yaitu Kepala Dinas Kesehatan.

3) Pelayanan KB, IUD (alat KB), donor darah dan penyuluhan HIV/AIDS diikuti oleh sebagian besar masyarakat Gandul. Lokasi berada di rumah Bpk. Edi Prayitno RT04/RW01 Desa Gandul. Penanggung jawab pelaksana adalah Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan, Kepala UPT Palang Merah Indonesia serta komisi penyuluhan AIDS.

Antusiasme masyarakat luar biasa pada kegiatan pelayanan kesehatan. Dari balita sampai lansia ikut serta dalam kegiatan pelayanan kesehatan. Masyarakat sudah mulai sadar pentingnya menjaga kesehatan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sutikno:[15]

> Pelayanan kesehatan menjadi salah satu yang paling banyak peminatnya. Selain gratis dikarenakan pemkab menyediakan banyak penyuluhan tentang menjaga kesehatan dan penyakit berbahaya, serta berbagai dokter spesialis, sehingga masyarakat berbondong-bondong antri untuk mengikuti penyuluhan, melakukan cek kesehatan ataupun berobat.

Dengan adanya pelayanan kesehatan gratis, maka masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk berobat dapat menikmati pengobatan tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun.

[15]Sutikno, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kegiatan pelayanan publik

1) Bidang administrasi mengurus kartu kuning, KK, KTP, akta kelahiran, serta legalisasi surat nikah. Lokasi pelayanan tersebut di kantor desa Gandul. Selaku penanggung jawab yaitu Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispenduk Capil), dan KUA.
2) Bidang pendidikan mengurus legalisasi ijazah dan pelayanan perpustakaan. Lokasi pelayanan tersebut di kantor desa Gandul. Selaku penanggung jawab yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Perpustakaan dan Kearsipan.
3) Bidang perijinan mengurus surat ijin usaha perdagangan (SIUP), tanda daftar gudang (TDG) dll. Lokasi pelayanan tersebut di kantor desa Gandul. Selaku penanggungjawab yaitu Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT).
4) Bidang pertanahan mengurus klinik pertanahan. Lokasi pelayanan tersebut di kantor desa Gandul. Selaku penanggungjawab yaitu Kepala kantor pertanahan.
5) Bidang perekonomian dan kesejahteraan mengurus konsultasi usaha dan pelayanan tabungan kredit. Lokasi pelayanan tersebut di kantor desa Gandul. Selaku penanggungjawab yaitu Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata (Koperindagpar) dan direktur PD BPR (Bank daerah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya kegiatan pelayanan publik yang mencakup berbagai bidang administrasi, mempermudah masyarakat dalam hal perijinan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sutarmi:[16]

> Adanya pembuatan surat-surat seperti mengurus KTP, surat nikah dan surat ijin dagang mempermudah masyarakat. Yang biasanya berbelit-belit, dengan adanya BST surat-surat ijin dengan cepat dan mudah untuk diurus. Biaya yang dikeluarkan juga sedikit.

f. Kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan ternak dan kawin suntik. Lokasi pelayanan tersebut berada di pekarangan rumah warga desa Gandul. Selaku penanggungjawab yaitu Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. Dengan adanya pemeriksaan hewan ternak diharapkan dapat menjaga dan melestarikan potensi ternak di Desa Gandul. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa Gandul yaitu Bapak Sunarto:[17]

> Potensi peternakan di Gandul sangat tinggi. Terutama kambing dan sapi. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan hewan ternak maka sangat membantu menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan hewan ternak sehingga ketika di jual dapat dengan harga tinggi. Kalau untuk kawin suntik sangat membantu, dalam hal ini pelestariannya. Sehingga hewan ternak bisa berkembang biak dan memperbanyak potensi ternak yang ada di Desa Gandul.

g. Pasar murah dilaksanakan di lapangan perhutani RT09/RW02 desa Gandul. Jenis barang yang ditawarkan adalah sembako dengan potongan harga 20% - 30%. Sembako tersebut terdiri dari gula, minyak goreng dan beras. Penanggungjawab pelaksana adalah Kadin Koperindagpar. Dengan adanya sembako murah, dapat membantu mengurangi biaya kebutuhan dapur. Meskipun hanya 20%-30% tetapi sangat bermanfaat bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Sutarmi:[18]

---

[16]Sutarmi, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.
[17]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.
[18]Sutarmi, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Pembagian sembako murah sangat membantu kebutuhan rumah tangga. Meskipun potongannya tidak banyak tetapi mengurangi beban masyarakat. Walaupun antri tetapi banyak ibu-ibu sangat antusias. Tetapi ada beberapa yang tidak mendapat sembako meskipun memiliki kupon karena sembako habis.

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Munir yang menyatakan bahwa:[19]

> Jadi bantuan sembako ini tidak hanya diterima oleh warga Gandul, tetapi warga desa sekitar juga dapat menikmatinya asalkan memiliki kupon. Tidak hanya sembako, tetapi berbagai pelayanan dan bantuan lainnya juga dapat dinikmati warga desa sekitar. Namun tetap menjadi prioritas adalah warga Gandul karena desa-desa lain nantinya akan mendapat giliran untuk program BST.

h. Bantuan yang diberikan:

1) Kegiatan keagamaan : 1 paket (bantuan dana/ Rp. 1.500.000,-)
2) Bantuan Gakin : 50 paket
3) Beasiswa SD/MI : 10 anak @Rp. 120.000,-
4) Beasiswa SMP/MTs : 5 anak @Rp. 240.000,-
5) Alat Peraga Edukatif (APE) : 2 set
6) BGM/BGT : 10 paket

Sesuai peraturan teknis pelaksanaan kegiatan hampir semua dilaksanakan pada program BST di Desa Gandul. Kegiatan yang tidak ada saat pelaksanaan kegiatan di Gandul adalah penghijauan. Penghijauan tidak dilakukan di Desa gandul karena termasuk desa yang hijau dan asri. Pemkab melalui BST memang memberikan bantuan dan kegiatan sesuai kebutuhan desa dan masyarakat.

Pada data yang didapat dari hasil beberapa wawancara diatas, maka pada dasarnya implementasi program Bhakti Sosial Terpadu sudah sesuai dengan rencana dan tujuan. Namun setiap program yang dilakukan pemerintah, selalu

[19]Munir, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki hambatan. Berikut uraian tentang hambatan pada pelaksanaan program Bhakti Sosial Terpadu.

2. Hambatan Pelaksanaan Program Bhakti Sosial Terpadu

Implementasi program tidak dapat terlepas dari hambatan-hambatan yang menjadi kendala suksesnya sebuah program. Begitupula dengan program BST yang memiliki beberapa hambatan. Selain hambatan alami seperti hujan adapula beberapa hambatan yang berdampak dalam memaksimalkan keberhasilan program BST.

Kegiatan-kegiatan dalam BST seperti kerja bakti yang terkesan monoton dan hanya berupa kegiatan fisik merupakan penghambat yang dinilai membosankan sehingga dapat memicu menurunnya partisipasi masyarakat. Kerja bakti yang diinginkan tidak hanya berbentuk kegiatan fisik namun kegiatan-kegiatan non-fisik ataupun kegiatan fisik tetapi bukan hanya pengaspalan jalan. Meskipun dengan adanya kegiatan tersebut menjadi wadah masyarakat untuk saling gotong royong untuk melaksanakan pembangunan.[20] Diungkapkan oleh Bapak Sakun:[21]

> Kerja bakti yang dilaksanakan seperti pengaspalan jalan terkesan itu-itu saja, belum ada bentuk kerja bakti yang lain selama ini. Sehingga dikhawatirkan masyarakat merasa bosan dengan kegiatan kerja bakti dalam bentuk pengaspalan jalan. Meski begitu, dengan adanya kegiatan kerja bakti membuat masyarakat saling bergotong royong dan guyub rukun.

Selain hambatan diatas, pihak pemkab sendiri mengungkapkan bahwa semakin banyak permintaan warga lewat kegiatan sarasehan yang tidak bisa terjawab tuntas. Permintaan tersebut membutuhkan kajian mendalam karena

[20]... *Konsep Bhakti Sosial Terpadu Pola Baru*, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
[21]Sakun, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum terprogram dalam APBD tahun berjalan, sehingga membutuhkan proses yang panjang. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Suciati:[22]

> Ada beberapa program dan bantuan yang memang perlu pengajuan proposal dan prosesnya lama. Bahkan ada yang gagal, karena belum terprogram di rancangan APBD. Sejauh ini di desa-desa yang sudah mendapat program BST merasakan hal tersebut. Namun di Gandul belum ada bantuan yang proposalnya di tolak. Mungkin pemkab masih memilih dan menyaring yang menjadi prioritas di Desa Gandul.

Selain itu, ada tim evaluasi dan tim investigasi yang telah di tetapkan dalam SK Bupati nomor 188.45/13/KPTS/402.031/2012 tetapi sudah tidak aktif lagi. Sehingga tugas dua tim tersebut menjadi tugas Bappeda utamanya bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil). Dalam hal ini, menjadi tugas yang berat karena dalam tahap perencanaan, investigasi maupun evaluasi menjadi tugas Bappeda. Seperti pernyataan Bapak Edi:

> Tim investigasi dan tim evaluasi sudah tidak aktif lagi, sehingga seluruh tugas tim tersebut dilakukan oleh Bappeda. Jadi kekurangan saat berjalannya program BST di sebuah desa, atau kritik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan disuatu desa tidak dapat terserap dengan sempurna sehingga menghambat proses perbaikan program BST di desa berikutnya.

Berdasarkan hasil dari beberapa wawancara diatas, maka hambatan-hambatan yang ada pada program BST merupakan sebuah tantangan untuk Pemerintah Kabupaten Madiun maupun dinas terkait, Pemerintah Desa maupun masyarakat untuk saling berkoordinasi agar program Bhakti Sosial Terpadu berjalan sesuai dengan tujuan dan semakin baik daripada yang diharapkan.

C. Sinergi Pemerintah dan Masyarakat pada Program Bhakti Sosial Terpadu

Sinergi merupakan bentuk komunikasi, koordinasi dan kerjasama. Dalam penelitian ini sinergi yang dimaksud adalah komunikasi, koordinasi dan kerjasama

[22]Suciati, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara Pemerintah Kabupaten Madiun, Pemerintah Desa Gandul dan masyarakat Gandul dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Dalam pembangunan berkelanjutan, pemerintah berperan sebagai administrator yang harus mendengarkan keluhan dan melayani masyarakat. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman saat diselenggarakan pembangunan maka dibutuhkan komunikasi yang efektif dan produktif antara Pemkab Madiun, Pemerintah Desa Gandul dan Masyarakat Gandul. Program BST sebagai wujud program Bupati Madiun, juga membutuhkan sinergi yang tepat antara pemkab, pemdes dan masyarakat agar tujuan program BST dapat berjalan sesuai aturan.

Komunikasi, koordinasi dan kerjasama dilakukan oleh Pemkab Madiun dan Pemdes Gandul. Hal tersebut terlihat pada proses penentuan lokasi atau titik pembangunan yang akan dijalankan. Koordinasi penentuan lokasi tersebut sudah dilakukan sejak beberapa bulan sebelum pelaksanaan BST di Gandul. Namun, koordinasi tentang pelaksanaan teknis lapangan menurut Pemdes Gandul terkesan mendadak. Tetapi tidak demikian bagi pemkab, karena pemkab memang sudah memiliki jadwal tentang koordinasi pelaksanaan teknis lapangan yang dilaksanakan seminggu sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Devi:[23]

> Koordinasi pemkab dan pemerintah tentang pembangunan berkelanjutan di Desa Gandul sudah dilakukan beberapa bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Begitu juga dengan titik atau lokasi pembangunan. Pihak desa sudah koordinasi dengan pemkab. Tetapi kalau koordinasi ketika pelaksanaan kegiatan saat hari H sangat mendadak, seperti tempat menginap bupati dan sebagainya. Koordinasi yang seperti itu dadakan sekali yaitu seminggu sebelumnya.

Meskipun koordinasi saat teknis pelaksanaan lapangan kurang sinkron, tetapi Pemdes Gandul mencoba menyesuaikan hal tersebut agar pelaksanaan lapangan tidak rancu. Apabila saling mencoba untuk mementingkan keberhasilan program dan

[23]Devi Amalia, *Wawancara*, Madiun, Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan masyarakat maka harus ada koordinasi dan kerjasama antar pemerintahan. Seperti pernyataan lanjutan dari Ibu Devi:

> ...Meskipun begitu, Pemerintah Desa Gandul tetap mencoba menyesuaikan diri. Bagaimanapun juga keberhasilan kegiatan BST bergantung pada teknis pelaksanaan lapangan. Kerjasama antar pemerintahan juga sebagai kunci keberhasilan program. Kalau antar pemerintahan tidak dapat bekerja sama maka program yang dilaksanakan akan rancu.

Selain itu, pemkab dan pemdes bekerjasama melakukan sosialisasi untuk pelaksanaan BST kepada masyarakat. Seperti pernyataan salah seorang warga yaitu Bapak Sunarto:[24]

> Jadi 2 hari sebelum diadakannya BST, ada pihak pemkab keliling desa menggunakan mobil dan alat pengeras suara, mengumumkan bahwa akan ada kegiatan BST yang mana masyarakat harus ikut serta karena banyak kegiatan pelayanan publik yang diadakan oleh pemkab. Kemudian sehari sebelum kegiatan BST, pemerintah desa gantian keliling desa untuk mengumumkan tentang BST.

Dalam hal ini, Pemkab Madiun telah melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemerintah daerah, terutama dalam bidang pembangunan berkelanjutan. Seperti pada pembahasan tentang implementasi kegiatan BST, pemkab telah melaksanakan tugas utamanya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui penyelenggaraan program pembangunan, Pemkab Madiun mengatur, mengurus dan mengelola seluas-luasnya potensi yang ada bersama masyarakat. Didukung dengan pernyataan Bapak Sunarto selaku Kepala Desa:[25]

> Dengan adanya program BST, mempermudah pembangunan desa. BST adalah sarana untuk mempercepat pembangunan terutama dalam pelayanan publiknya. BST merupakan satu-satunya program yang ada di Indonesia. Karena BST merupakan wujud kinerja Pemkab Madiun dalam melaksanakan pembangunan.

[24]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, Januari 2017.
[25]Sunarto, *Wawancara*, Madiun, Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain sinergi antara Pemkab Madiun dan Pemdes Gandul, adapula sinergi antara Pemdes Gandul dan Masyarakatnya. Terutama dalam pembangunan potensi-potensi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Munir:[26]

> Pemerintahan Desa Gandul yang baru memiliki program kerja baru. Seperti pembentukan kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari 4 pokja. Pokja 1 mengerjakan tentang keagamaan, etika, sopan santun, dan kenakalan remaja. Pokja 2 mengerjakan tentang prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), lingkungan bersih sehat (LBS), dan yang terbaru bina keluarga balita (BKB). Pokja 3 mengerjakan tentang penyuluhan kesehatan masyarakat yang didalamnya ibu-ibu dan bapak-bapak kerja bakti menjaga dan membersihkan lingkungan supaya terhindar dari penyakit-penyakit seperti DBD, flu, batuk dsb. Pokja 4 mengerjakan tentang taman posyandu yang terdiri dari PAUD, posyandu dan BKB.

Pernyataan diatas merupakan bentuk sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Pemerintah desa memberi ruang untuk masyarakat supaya terus mengembangkan potensi yang dimiliki. Dan potensi tersebut kemudian dimunculkan dalam perencanaan kegiatan BST. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Ibu Suciati:[27]

> Selain pokja, ada pula kepengurusan khusus tentang UMKM dan koperasi. Ketika BST, UMKM dan koperasi yang ada diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Seperti adanya pembuatan tahu pong, kolak gaplek, pentol dari jamur dan es cincau. Hanya saja untuk alat dan pemasaran masih terkendala. Tetapi proses penyerahan proposal ke pemkab sudah dilakukan.

Selain yang dilakukan Pemdes Gandul dengan pemberdayaanya, disisi lain masyarakat sangat partisipatif dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan ketika BST di pokja-pokja tersebut. Seperti berbagai keterampilan dalam UMKM. Masyarakat sangat antusias mengikuti kesempatan tersebut, karena sebagai modal awal dalam memulai sebuah usaha. Menurut pernyataan Ibu Sutarmi:[28]

> Masyarakat terutama ibu-ibu sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pengembangan UMKM ini. Dengan adanya pengembangan keterampilan

[26]Munir, *Wawancara*, Madiun, Januari 2017.
[27]Suciati, *Wawancara*, Madiun, Januari 2017.
[28]Sutarmi, *Wawancara*, Madiun, Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seperti membuat bermacam-macam olahan makanan akan membantu meningkatkan kualitas usaha yang dijalankan dan bagi yang belum memiliki usaha dapat menjadi pijakan awal supaya memiliki keinginan untuk berwirausaha.

Pemkab Madiun berserta dinas-dinas dan juga masyarakat Gandul gotong royong dan bekerjasama membangun infrastruktur dengan pengaspalan jalan. Pemkab Madiun bersama dinas terkait terjun langsung ke lokasi pengaspalan, bukan hanya untuk mengawasi berjalannya kegiatan tetapi juga ikut membantu membangun jalan bersama masyarakat. Seperti pernyataan Bapak Puput:[29]

> Waktu kegiatan pengaspalan jalan, beberapa orang dari pemkab dan dinas-dinas terkait terjun langsung ke lokasi. Bukan hanya *mandori* saja, tetapi juga ikut membantu masyarakat membangun jalan. Jadi mereka juga ikut nyangkul-nyangkul tanah, dan lain-lain. Dengan begitu masyarakat merasakan gotong royong dan lebih bersemangat.

Berdasar pernyataan diatas maka Pemerintah Desa Gandul sudah melaksanakan pendampingan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya mengembangkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewujudkan tujuan program BST yaitu kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan.

Sinergi antara Pemkab Madiun, Pemdes Gandul dan Masyarakat terwujud dalam suatu program yaitu Bhakti Sosial Terpadu. Pemkab sebagai penyelenggara dan administrator mampu menyelenggarakan program pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat secara langsung termasuk dalam perumusan perencanaan pembangunan. Pemdes yang mampu berkoordinasi dengan baik dengan pemkab serta meningkatkan dan menggerakan partisipasi masyarakat dan membantu pemkab dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Dan masyarakat yang aktif dalam musayawarah perencanaan pembangunan serta memberi respon luar biasa saat pelaksanaan program sehingga menciptakan keberhasilan program BST.

[29]Puput, *Wawancara*, Madiun, Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini juga melihat tentang proses tahapan kebijakan. Proses tahapan kebijakan yang dilakukan pada program BST melalui empat tahap yaitu *pertama*, penyusunan agenda yang membahas tentang masalah-masalah yang dipilih untuk menjadi agenda program. Seperti yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Madiun yaitu dengan melakukan penyaringan masalah-masalah yang di sampaikan oleh masyarakat. Selain itu SKPD juga memilih masalah yang akan dijadikan program dengan kesesuaian APBD yang sudah ada. Setelah memilih masalah tersebut, kemudian SKPD mencari data detail sehingga dapat dilanjutkan pada tahap perumusan kebijakan.

Perumusan masalah atau perumusan kebijakan merupakan wadah untuk diskusi sehingga dapat mencapai kesepakatan. Namun apabila tidak mencapai kesepakatan maka kebijakan atau program tersebut gagal dikeluarkan. Dalam penelitian ini, perumusan kebijakan tercermin dalam proses musyawarah yang dilakukan oleh SKPD Madiun, Pemerintah Desa Gandul, ketua RT, tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat Gandul. Proses musyawarah tersebut membahas tentang masalah yang nantinya dapat dijadikan suatu kegiatan dalam Bhakti Sosial Terpadu (BST). Berdasar pernyataan Ibu Devi:[30]

> Jadi sebelum program BST dilaksanakan, pemdes mengundang ketua RT, tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat untuk musyawarah di kantor desa. Isinya musyawarah membahas tentang permasalahan yang dianggap penting untuk untuk masyarakat utamanya masalah pembangunan. Setelah semua sepakat program apa saja yang diajukan, kemudian pemdes mengajukan ke pemkab, kemudian pemkab bersama SKPD menyaring hasil musyawarah kami tadi.

Setelah perumusan dirumuskan dan disahkan, selanjutnya yaitu tahap implementasi kebijakan. Implementasi merupakan realisasi dari kebijakan yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini implementasi dilakukan yaitu melalui kegiatan-

[30]Devi Amalia, *Wawancara*, Madiun, Januari 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegiatan program Bhakti Sosial Terpadu (BST). Kegiatan tersebut seperti bermacam-macam bantuan, bentuk pelayanan administrasi publik, serta berbagai penyuluhan. Dengan berbagai macam kegiatan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat bahkan diharapkan mampu menjawab semua permasalahan yang menjadi agenda dan rumusan kebijakan.

Tahap akhir yaitu evaluasi yang merupakan penilaian terhadap dampak kebijakan. Dalam penelitian ini, tahapan evaluasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun sudah tercantum dalam SK Bupati yaitu tim evaluasi yang terdiri dari beberapa SKPD tetapi implementasinya tidak sesuai dengan SK tersebut. Apabila evaluasi tidak berjalan maka kekurangan atau hambatan yang ada saat implementasi kebijakan tidak dapat terlihat dan susah untuk diperbaiki. Meskipun dalam hal ini, evaluasi diserahkan pada Bappeda saja tetapi tetap menghambat tujuan adanya program BST, karena Bappeda mengatasi berbagai urusan BST dan mengancam maksimalnya proses evaluasi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id